

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian tentang Pengaruh Media Komik dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pengembangan *Political Literacy* Siswa menarik dilakukan karena:

Pertama, partisipasi politik dalam pemilu yang rendah turut menjadi rasionalisasi adanya pendidikan politik bagi siswa. Pendidikan politik di ranah formal diharapkan menjadi dasar pengetahuan politik siswa sebagai pemilih pemula. Dalam penelitiannya tentang sosialisasi politik, Kraus dan Davis dalam Suryadi (2007, hlm. 78) menemukan bahwa demokrasi bertumpu kepada pendidikan, tingkat pengetahuan warga dan tindakan yang bertanggung jawab atas dasar kaidah-kaidah umum. Lebih lanjut Suryadi (2007, hlm. 78) berpendapat bahwa partisipasi politik tanpa kognisi adalah absurditas belaka. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikonfirmasi bahwa pendidikan politik yang masih rendah menjadi bagian dari penyebab berkurangnya partisipasi politik warga negara ketika pemilihan umum (pemilu).

Rendahnya pendidikan politik serta tingkat pengetahuan warga dapat dilihat secara praksis atau empiris dari tingginya tingkat suara tidak sah, dimana jumlah surat suara tidak sah di Pemilu legislatif (Pileg) 2014 adalah 14.601.436 atau sekitar 10% dari surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara tidak sah di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 adalah 1.379.690 atau 1,02% dari surat suara yang digunakan. (Dikutip dari www.rumahpemilu.org/in/laporan/8480/laporan-pemilu-2014). Hal yang serupa juga tampak pada redahnya tingkat partisipasi politik di daerah Jombang. Berdasar pada data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Jombang, terdapat sekitar 33,3% warga di Kabupaten Jombang memilih golput dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2013 lalu.

Kedua, kurangnya pengetahuan politik pemilih dalam pemilu juga disebabkan oleh sosialisasi politik yang kurang efektif dari para calon

legislatif atau presiden. Analisis kurangnya pengetahuan para pemilih pemula berkaitan dengan sosok calon legislatif yang akan dipilih merupakan sosok yang aspiratif bagi kepentingan rakyat ditunjukkan dalam hasil penelitian Litbang “Kompas” pada tahun 2013 yang ditunjukkan bahwa sebesar 62,4% pemilih tidak yakin, 30,6% pemilih yakin, dan 7,0% pemilih tidak tahu atau tidak menjawab. Penelitian Litbang “Kompas” dilakukan kepada 703 responden yang minimal berusia 17 tahun dan dipilih secara acak dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, Manado, Pontianak, Banjarmasin, dan Denpasar. Penelitian tersebut membuktikan bahwa sebagian besar pemilih cenderung tidak yakin apakah calon legislatif pada pemilu tahun 2014 merupakan sosok yang aspiratif pada kepentingan rakyat.

Ketiga, kedudukan fundamental Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam proses pendidikan politik, sesuai dengan pendapat Maftuh dan Sapriya (2005, hlm. 321) bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekkan politik (*political literacy*) dan kesadaran politik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi. Brownhill dan Smart (1989, hlm. 4) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan politik ialah :

“The aim of political education should therefore be to develop of professionalis interest and to poni them toward theirpolitical responibilities, while at the sometime endeavouring to give them the necessary knowledge and skills to carry out those responibilities”.

Sehingga, pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana pendidikan politik formal juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan membentuk komponen-komponen dasar warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Dalam konteks *Civic*

Education, komponen-komponen warga negara yang baik (dalam Winarno, 2013, hlm. 26) terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Ketiga komponen tersebut berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara meliputi rasa percaya diri (*civic confidence*), warga negara yang mampu/memiliki kemampuan (*civic competence*), warga negara yang memiliki komitmen (*civic commitment*) (dalam Winarno, 2013, hlm.27).

Ketiga komponen warga negara yang cerdas dan baik tersebut pada akhirnya ialah akan menghasilkan warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan, dan bertanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk ikut berpartisipasi aktif secara sosial politik dalam memajukan kehidupan warga negara. Siswa diharapkan sebagai warga negara yang dapat lebih memahami tentang nilai serta moral untuk membentuk karakter warga negara sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia sehingga dapat tercipta warga negara yang melek politik (*political literacy*).

Keempat, rendahnya tingkat *political literacy* warga, terutama para remaja sebagai pemilih pemula. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Suryadi (2007, hlm. 82) tentang media massa dan *political literacy* yang menemukan bahwa meski dalam taraf yang rendah, pemelekwacanaan politik (*political literacy*) terjadi melalui pemanfaatan berita politik di kalangan remaja, akan tetapi terpaan berita politik tentang partai politik dan kandidat tidak simetris dengan jumlah suara yang akan diraih dari kalangan remaja. Sehingga, penelitian ini membuktikan bahwa tingkat *political literacy* warga, terutama para remaja sebagai pemilih pemula cukup rendah.

Kelima, penerapan pendidikan politik melalui PKn dilakukan sebagai upaya untuk dapat membangun serta mengembangkan kompetensi pengetahuan, watak, dan kecakapan siswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan kompetensi tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menumbuhkan kemampuan melek politik (*political literacy*) siswa atau

kemelekan siswa dalam kehidupan politik negaranya. Hal tersebut sesuai dan diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhiat (2009, hlm. 187) yang menyimpulkan bahwa pembelajaran PKn memberikan pengaruh dalam meningkatkan tingkat melek politikan (*political literacy*) warga negara. Pratama (2012, hlm. 131) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa PKn sebagai pendidikan politik berpengaruh terhadap pengembangan *political literacy* siswa.

Keenam, pengembangan *political literacy* siswa melalui PKn merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan, mengingat dalam konteks pembelajaran PKn yang berisikan pemahaman-pemahaman mengenai teori serta penjelasan tentang politik yang susah untuk dapat di pahami oleh siswa. Oleh karena itu, dalam pengembangan *political literacy* siswa juga harus di dukung oleh kemampuan guru dalam mengajar serta memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran sehingga siswa dapat dengan lebih mudah memahami materi yang diajarkan serta dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Ketujuh, problem pembelajaran dalam PKn juga meliputi kualitas pribadi yang dibentuk melalui pengembangan model pembelajaran dalam proses pendidikan formal (Winataputra, 2012, hlm. 124). Sehingga pembelajaran PKn harus diarahkan kepada pembelajaran yang lebih berfokus kepada siswa (*student oriented*) dan dengan model pembelajaran variatif untuk mengembangkan keseluruhan aspek kemampuan siswa, baik ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Variasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat dilihat dari strategi, metode, serta media pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran pada peserta didik. Variasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru juga sebagai upaya untuk dapat mewujudkan kualitas pembelajaran yang baik. Oleh karena itu dalam melakukan variasi pembelajaran, selain kemampuan, keahlian serta pengetahuan yang dimiliki oleh guru juga diperlukan adanya pemanfaatan media pembelajaran yang merupakan komponen pendukung dalam proses pembelajaran.

Kedelapan, optimalisasi variasi pembelajaran dalam pendidikan politik melalui PKn dapat diupayakan dengan menggunakan media pembelajaran komik. Pemilihan komik sebagai media pembelajaran yang dianggap tepat sebagai sarana penyampaian materi PKn dalam upaya pengembangan *political literacy* siswa. Pemilihan komik sebagai media pembelajaran juga dirasa tepat karena banyaknya antusiasme para pecinta komik terutama kalangan remaja. Komik seperti *Hai Miko*, *Detective Conan* dan *Naruto* menjadi buku anak terlaris pada Januari 2015. Sejak tahun 2008 Penerbit Elex Media Komputindo menerbitkan sekitar 900 judul, masing-masing dengan oplah 3000 eksemplar. Managing Editor for Comics and Comic magazines Elex Media Ratna Sari mengatakan, *manga* (komik jepang) digemari karena menampilkan alur cerita yang mudah dipahami dan gambar yang “hidup”. (Dikutip dalam Kompas pada Rabu, 4 Februari 2014). Selain itu, pemilihan komik sebagai media pembelajaran juga diperkuat oleh hasil penelitian dari Ikhsaniyah (2015, hlm. 69) tentang efektivitas media komik biologi materi virus melalui pembelajaran kooperatif tipe *cooperative integrated reading and composition* (CIRC) terhadap motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas X SMA N 1 Sewon menemukan bahwa media komik biologi materi virus melalui pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Comporition* (CIRC) efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas X di SMA N 1 Sewon. Penelitian ini membuktikan bahwa media komik merupakan media pembelajaran interaktif yang efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian yang ingin diangkat adalah pengembangan *political literacy* siswa sebagai pemilih pemula. Pengembangan *political literacy* siswa bukan merupakan hal yang mudah, karena diperlukan sebuah proses pembelajaran yang variatif dan kreatif sebagai upaya untuk

meningkatkan minat serta pemahaman siswa. Secara teoritis, pengembangan *political literacy* siswa dapat dioptimalkan melalui pembelajaran PKn sebagai sarana pendidikan politik untuk dapat membentuk siswa sebagai warga negara yang paham dan melek politik. Akan tetapi, dalam kenyataannya pengembangan *political Literacy* (melek politik) warga negara yang masih rendah belum didukung oleh optimalisasi pendidikan politik di lembaga formal pendidikan. Selain itu, visi dan misi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), khususnya dalam bidang pendidikan politik bertujuan untuk mengembangkan serta membangun siswa untuk bisa menjadi warga negara yang tidak hanya baik, tetapi juga cerdas (*to be smart and good citizen*). Akan tetapi dalam kenyataannya, proses pembelajaran PKn yang masih bersifat berpusat pada guru dan kurang mengeksplorasi keseluruhan kemampuan peserta didik, sehingga belum mampu untuk membuat siswa menjadi seorang warga negara yang tidak hanya baik, tetapi juga cerdas sesuai dengan tujuan diselenggarakannya PKn belum dapat tercapai. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana pendidikan politik formal memerlukan variasi media pembelajaran karena pendidik (guru) cenderung hanya menggunakan media yang monoton dalam menyampaikan materi berkaitan dengan politik.

2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasar pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum rumusan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: Apakah ada pengaruh media komik dalam konsep budaya politik terhadap pengembangan *political literacy* siswa?

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka rumusan masalah di atas dapat dikembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi siswa terhadap penggunaan media komik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan *political literacy* siswa?

- b. Bagaimana tingkat *political literacy* siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada konsep budaya politik?
- c. Apakah terdapat perbedaan pengetahuan politik siswa antara kelas yang menggunakan media komik dengan kelas yang tidak menggunakan media komik pada konsep budaya politik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
- d. Apakah terdapat perbedaan sikap politik siswa antara kelas yang menggunakan media komik dengan kelas yang tidak menggunakan media komik pada konsep budaya politik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
- e. Apakah terdapat perbedaan keterampilan politik siswa antara kelas yang menggunakan media komik dengan kelas yang tidak menggunakan media komik pada konsep budaya politik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menggali, mengkaji, mengorganisasikan informasi, mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, serta menganalisis secara mendalam pengaruh media komik dalam pemahaman konsep budaya politik pada mata pelajaran PKn terhadap pengembangan *political literacy* siswa.

2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan secara khusus dalam penelitian adalah bertujuan untuk mendiskripsikan, mengkaji, dan menganalisis:

- a. Menganalisis persepsi siswa terhadap penggunaan media komik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan *political literacy* siswa.
- b. Menganalisis tingkat *political literacy* siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada konsep budaya politik.

- c. Menganalisis perbedaan pengetahuan politik siswa antara kelas yang menggunakan media komik dengan kelas yang tidak menggunakan media komik pada konsep budaya politik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- d. Menganalisis perbedaan sikap politik siswa antara kelas yang menggunakan media komik dengan kelas yang tidak menggunakan media komik pada konsep budaya politik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- e. Menganalisis perbedaan keterampilan politik siswa antara kelas yang menggunakan media komik dengan kelas yang tidak menggunakan media komik pada konsep budaya politik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teori

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan, menggali, mengkaji, mengorganisasikan informasi, mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam seputar pengaruh media komik dalam pemahaman konsep budaya politik pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan *political literacy* siswa guna memberikan pengembangan bagi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disekolah.

2. Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berkaitan dengan strategi pembelajaran dengan menggunakan media komik dalam pengembangan *political literacy* siswa. Sehingga dapat meningkatkan *civic competence* siswa yang meliputi *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Dengan meningkatnya *civic competence* siswa terhadap *political literacy*, diharapkan siswa dapat ikut lebih aktif dalam berpartisipasi serta berkontribusi pada sistem politik negara Indonesia dan bisa menjadi solusi terhadap persoalan

politik yang sedang terjadi serta bisa membawa Indonesia pada kehidupan politik yang lebih baik.

3. Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a. Bagi peneliti lanjutan, sebagai bahan informasi dan perbandingan agar dikembangkan media pembelajaran untuk dapat meningkatkan ketercapaian tujuan diselenggarakannya Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.

4. Segi Isu dan Aksi Sosial

Secara isu dan aksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Pada masyarakat umum, sebagai bahan refleksi dan motivasi untuk berpartisipasi dan ikut berkontribusi secara aktif dalam upaya mencapai kehidupan politik yang lebih baik.
- b. Para akademisi dan praktisi Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif mengenai pentingnya adanya inovasi pembelajaran khususnya dalam penggunaan serta pemanfaatan media pembelajaran agar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bisa lebih menarik sehingga tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan dapat tercapai.
- c. Para pejabat pemerintah, khususnya menteri pendidikan lebih mempertegas pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih komprehensif melalui berbagai kebijakan serta dapat membangun siswa sebagai generasi penerus yang memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai kehidupan politik negara.

E. Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis ini terdiri dari lima (5) bab, yaitu bab I pendahuluan, bab II kajian teori, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bab V kesimpulan.

Bab I (Pendahuluan) berisi latar belakang penelitian yang memberikan konteks pentingnya masalah untuk diteliti, identifikasi perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II (Landasan Teori) menyajikan tentang kajian konsep dan teori yang berisi deskripsi, analisis konsep, teori-teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan yaitu tentang pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media pembelajaran komik terhadap *political literacy* siswa, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

Bab III (Metode Penelitian) diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri atas pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan jadwal penelitian.

Bab IV (Temuan dan Pembahasan) berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan tentang pengolahan data dan analisa data temuan untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan.

Bab V (Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi) berisi kesimpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian tentang pengaruh media komik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada konsep budaya politik terhadap *political literacy* siswa.